



Climate
Resilience
Alliance



RINGKASAN EKSEKUTIF

Juni 2026

Jalur menuju adaptasi yang dipimpin oleh masyarakat lokal

Pembelajaran untuk pembiayaan ketahanan iklim yang efektif

Ringkasan eksekutif



 Temukan kami di LinkedIn »

 Kunjungi ZCRAlliance.org »

Tentang laporan ini

Laporan ini ditulis oleh Salomé Lehtman dan Sally Tyldesley serta memuat kontribusi dan masukan dari Moshir Rahman dan Shahnawaz Whara dari Concern Bangladesh; Shofiqul Islam dari Gana Unnayan Kendra Bangladesh; Tamanna Rahman, Palash Sarker, dan Nishat Tasnim dari Practical Action Bangladesh; Monica Cuba, Leon Lizon, dan Gabriela Terán dari Practical Action Bolivia; Arif Gandapurnama dan Denia Aulia Syam dari Prosper Global Indonesia; Shorouq Abu Razzouq, Nour Darwazeh, dan Ahmad Jaber dari Prosper Global Jordan; Lilian Amondi Abuoro dan Euniah Miruka dari Concern Kenya; Paul Carr, Misheck Chirwa, dan Twapashagha Twea dari Concern Malawi; Nabin Joshi dan Sanjit Shrestha dari Prosper Global Nepal; Suman Chapagain dan Bikram Rana dari Practical Action Nepal; Tunde Aremu, Oluwatomiwa Matthew Ande, dan Nasiru Mustapha dari Plan International Nigeria; Mia Grace Ligutan dari Philippines Red Cross; serta Canh Toan Vu dari ISET International.

Para penulis menyampaikan terima kasih kepada para penelaah sejawat yang dengan murah hati telah meluangkan waktu, termasuk Laura Bahlman, Gretta Fitzgerald, dan Seona McLoughlin dari Concern Worldwide; Mary Friel dan Francisco Ianni dari IFRC; Karen MacClune dari ISET; Raquel Guimaraes dari IIASA; Anna Beswick dari London School of Economics; Debbie Hillier, Barbara Rosen Jacobson, dan Selena Victor dari Prosper Global; Kristen Ostling, Stu Solomon, dan Manuel von der Mühlen dari Plan International; Chris Anderson, Demet Intepe, dan Joy Waddell dari Practical Action; serta Michael Szönyi dari Z Zurich Foundation.

Laporan ini diterbitkan oleh Zurich Climate Resilience Alliance, tetapi isi laporan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penulis dan organisasi yang disebutkan. Para anggota Zurich Climate Resilience Alliance menerima pembiayaan dari Z Zurich Foundation, kecuali Zurich Insurance Group. Namun, pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini tidak selalu mencerminkan posisi resmi Z Zurich Foundation maupun Zurich Insurance Group.

Sitasi: Lehtman, S. dan Tyldesley, S. (2026). *'Pathways to locally led adaptation: Lessons for effective climate resilience finance'*, laporan Zurich Climate Resilience Alliance.

Bermitra dengan:



Zurich Climate Resilience Alliance merupakan kolaborasi antara mitra dari kalangan kemanusiaan, organisasi nonpemerintah, lembaga penelitian, dan sektor swasta yang bekerja untuk membangun ketangguhan terhadap bahaya iklim di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Sebelumnya dikenal sebagai Zurich Flood Resilience Alliance, kami memiliki pengalaman lebih dari satu dekade dalam menghimpun bukti mengenai tingkat ketangguhan masyarakat saat ini terhadap bahaya iklim serta mengidentifikasi solusi yang sesuai.

Melalui program masyarakat jangka panjang, penelitian baru, serta upaya untuk memengaruhi pemangku kepentingan, kami berupaya mewujudkan perubahan sistemik dalam skala luas dan mewujudkan visi tentang dunia yang masyarakatnya lebih tangguh menghadapi bahaya iklim serta mampu berkembang dengan baik.

Didukung oleh Z Zurich Foundation. Informasi lebih lanjut: ZCRAlliance.org



Ringkasan eksekutif

Di seluruh dunia, masyarakat mengambil berbagai langkah untuk melindungi nyawa dan mata pencaharian dari banjir, kekeringan, gelombang panas, dan badai. Namun, seiring meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian tersebut, jelas bahwa laju adaptasi masih belum memadai. Struktur pembiayaan publik yang membentuk pelaksanaan Adaptasi Perubahan Iklim (Climate Change Adaptation/CCA) dan Pengurangan Risiko Bencana (Disaster Risk Reduction/DRR) sehari-hari masih terbatas, terfragmentasi, dan terlalu sering tidak terhubung dengan masyarakat yang paling terpapar bahaya iklim.

Ketahanan iklim tidak dapat dibangun dengan pendekatan dari atas ke bawah (top-down). Kerja Zurich Climate Resilience Alliance (selanjutnya disebut “Aliansi”) menunjukkan bahwa ketika masyarakat memiliki kewenangan, sumber daya, dan dukungan untuk bertindak, adaptasi menjadi lebih berkelanjutan dan berakar kuat pada prioritas mereka sendiri. Meskipun momentum terhadap prinsip-prinsip adaptasi yang dipimpin secara lokal terus meningkat (IIED, 2026), penerapannya secara penuh masih menjadi pengecualian, bukan hal yang lazim. Pendanaan untuk adaptasi yang dipimpin secara lokal masih terbatas, dan pengambilan keputusan pun sering kali masih terpusat.

Laporan ini menyarikan pembelajaran yang diperoleh Aliansi melalui keterlibatan langsung dalam proses perencanaan dan penganggaran di 10 negara, yaitu: Bangladesh, Bolivia, Indonesia, Yordania, Kenya, Malawi, Nepal, Nigeria, Filipina, dan Vietnam. Laporan ini menunjukkan bagaimana adaptasi yang dipimpin secara lokal dapat dilembagakan ketika prioritas masyarakat, perencanaan berbasis bukti, dan pembiayaan publik diselaraskan. Dalam berbagai konteks, tiga jalur secara konsisten muncul dan memberikan gambaran praktis tentang bagaimana upaya untuk memperkuat pembiayaan publik dan kebijakan bagi adaptasi yang dipimpin secara lokal diterapkan dalam kondisi nyata:

- memastikan tersedianya alokasi anggaran lokal khusus untuk CCA dan DRR;
- menjadikan bukti dari masyarakat sebagai landasan bagi kebijakan, perencanaan, dan upaya memengaruhi perumusan regulasi;
- memperkuat proses partisipatif yang memberikan pengaruh bermakna kepada pelaku di tingkat lokal, termasuk kelompok yang termarginalkan, dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya.

Untuk membantu mempercepat peralihan menuju adaptasi yang dipimpin secara lokal, laporan ini menghimpun pembelajaran praktis mengenai bagaimana pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga perantara¹ dapat memperkuat pengetahuan tentang risiko iklim, membentuk keputusan investasi, serta memengaruhi sistem pembiayaan publik daerah agar berinvestasi pada intervensi yang paling efektif dalam memperkuat ketahanan masyarakat.

Studi kasus dalam laporan ini tidak hanya menunjukkan apa yang dapat dicapai, tetapi juga bagaimana hal tersebut dapat diwujudkan dalam sistem tata kelola yang ada. Studi kasus tersebut menguraikan tindakan yang dilakukan, hasil yang dicapai, serta pembelajaran spesifik dan praktis yang dapat diterapkan di tempat lain. Studi kasus tersebut juga mengungkap sejumlah hambatan umum, yaitu: kendala fiskal struktural, siklus politik yang singkat, dan keterbatasan kapasitas, beserta cara-cara untuk mengatasinya. Bukti dari studi kasus tersebut menunjukkan bahwa ketika sistem pembiayaan publik menerapkan prinsip-prinsip adaptasi yang dipimpin secara lokal—seperti alokasi dana yang terarah yang dikelola secara terdesentralisasi di tingkat lokal, perencanaan yang inklusif, serta mekanisme transparansi dan akuntabilitas—investasi adaptasi akan lebih berpeluang untuk menjangkau masyarakat yang menghadapi risiko paling tinggi.

Di atas segalanya, berbagai studi kasus ini bertujuan untuk mendukung pembelajaran bersama—bukan dimaksudkan untuk menonjolkan proyek-proyek tertentu, melainkan untuk membantu pihak lain memahami bagaimana sistem pembiayaan publik dan perencanaan dapat menjadi lebih cerdas iklim, berbasis informasi risiko, dan responsif terhadap prioritas lokal.

Berdasarkan beragam pembelajaran tersebut, laporan ini mengidentifikasi serangkaian pendekatan praktis lintas bidang untuk menerapkan dan memperkuat adaptasi yang dipimpin secara lokal. Laporan ini juga menyajikan serangkaian rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti bagi lembaga perantara lainnya, donor dan penyandang dana, serta pemerintah di tingkat nasional dan daerah.

¹ Dalam sistem pembiayaan iklim internasional, lembaga perantara yang umum meliputi: lembaga multilateral dan bank pembangunan, dana yang dikelola pemerintah atau lembaga perantara nasional, organisasi masyarakat sipil, serta yayasan dan dana publik.

Pembiayaan adaptasi yang dipimpin secara lokal: jalur-jalur yang saling terhubung



Jalur 1

Memastikan tersedianya alokasi anggaran khusus di tingkat daerah untuk adaptasi dan pengurangan risiko bencana



Jalur 2

Memastikan kebijakan, perencanaan, dan regulasi berlandaskan bukti dan prioritas masyarakat



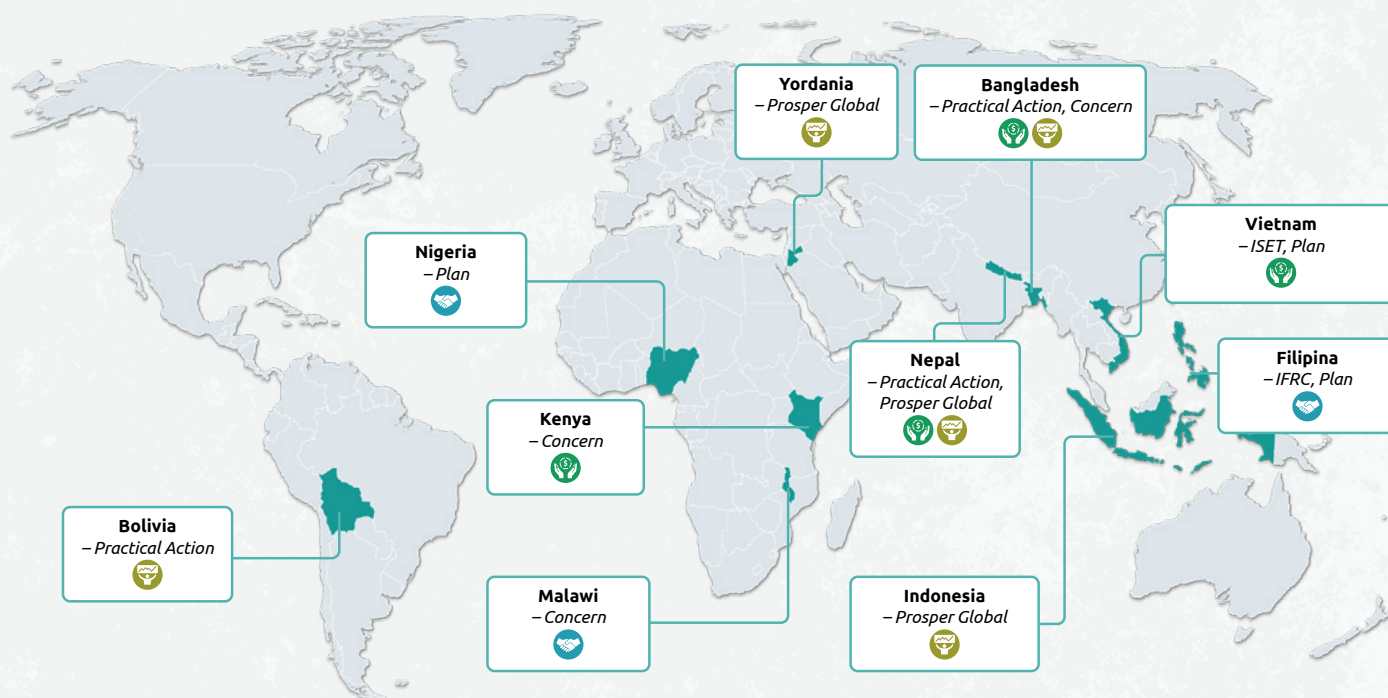
Jalur 3

Memperkuat rasa memiliki dan kepemimpinan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembiayaan



Ketahanan masyarakat yang diperkuat melalui adaptasi yang dipimpin secara lokal, secara efektif, dan berkelanjutan

Studi kasus pilihan



Apa yang berhasil: Pendekatan utama untuk mengintegrasikan adaptasi yang dipimpin secara lokal ke dalam sistem tata kelola publik



Memperkuat ruang dan kesempatan untuk konsultasi inklusif

Proses partisipatif perlu diperkuat agar benar-benar bermakna dan tidak hanya menjadi formalitas. Dengan menciptakan dan menyempurnakan sarana yang memungkinkan anggota masyarakat dan kelompok marginal terlibat langsung dengan para pengambil keputusan, maka perencanaan anggaran dan sistem akan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Pendekatan ini menjadi salah satu unsur utama dalam seluruh pekerjaan Aliansi. Aliansi mempertemukan perwakilan masyarakat, pemimpin daerah, pejabat pemerintah, dan anggota kelompok rentan, serta menyediakan saluran agar bukti yang dihasilkan masyarakat dapat menjadi masukan bagi keputusan perencanaan dan penganggaran. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan dukungan bagi para penggerak advokasi masyarakat (seperti di Yordania dan Kenya); pembentukan platform formal baru untuk keterlibatan (seperti di Yordania dan Nigeria); pembentukan komite pengelolaan risiko bencana (di Filipina); atau pengembangan komunitas praktik (di Vietnam).

POIN UTAMA: Penguatan saluran keterlibatan yang berkelanjutan di antara seluruh pemangku kepentingan dapat memperbaiki hubungan, membangun dukungan yang lebih luas terhadap aksi iklim yang diprioritaskan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.



Menyediakan bukti terperinci dari tingkat masyarakat mengenai kesenjangan ketangguhan pada waktu yang tepat

Bekerja sama dengan masyarakat untuk menghimpun bukti yang terperinci, spesifik, dan bersumber dari tingkat lokal mengenai kapasitas serta kesenjangan ketangguhan melalui Climate Resilience Measurement for Communities (CRMC)² telah menjadi landasan penting bagi seluruh pekerjaan Aliansi. Melalui lokakarya validasi, masyarakat sendiri yang mengidentifikasi dan menentukan prioritas intervensi yang mereka perlukan untuk memperkuat ketangguhan mereka. Bukti tersebut menjadi sarana yang kuat untuk membangun dukungan terhadap prioritas masyarakat. Pengaruhnya semakin besar ketika bukti tersebut tersedia pada saat anggaran dan prioritas sedang ditetapkan (seperti di Nepal) atau ketika digunakan sebagai masukan dalam forum perencanaan partisipatif (seperti di Indonesia). Dalam berbagai konteks, bukti saja tidak cukup untuk mengubah keputusan apabila tidak diselaraskan dengan proses perencanaan formal.

POIN UTAMA: Bukti perlu diselaraskan dengan siklus pengambilan keputusan agar dapat menjadi masukan bagi belanja publik.



Memadukan bukti teknis dengan keterlibatan politik

Upaya memengaruhi kebijakan yang berhasil, memadukan bukti teknis yang kredibel dengan keterlibatan berkelanjutan bersama para pengambil keputusan. Seluruh studi kasus ini memberikan fokus yang kuat kepada aspek politik, dengan melibatkan para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan untuk memahami kendala, insentif, serta kebutuhan mereka akan bukti. Pendekatan tersebut juga mencakup penyusunan dan penyampaian bukti serta analisis yang dapat memperkuat alasan untuk melakukan perubahan. Kegiatan tersebut meliputi kerja sama dengan anggota parlemen dan pemimpin tingkat provinsi (di Nepal, Indonesia, dan Kenya); kerja sama dengan pemuka adat dan pemerintah daerah (di Bolivia); penyusunan rencana yang dilengkapi dengan perhitungan biaya agar pemerintah daerah lebih mudah mengambil tindakan (di Bangladesh); serta menyoroti akumulasi biaya ekonomi akibat dampak iklim yang mengubah cara pandang terhadap DRR, dari sekadar pengeluaran menjadi investasi untuk melindungi aset pemerintah daerah (di Yordania).

POIN UTAMA: Bukti teknis memperkuat alasan untuk melakukan perubahan, sedangkan hubungan politik dan para penggerak perubahan membuka jalan bagi terwujudnya perubahan tersebut.

² Informasi lebih lanjut mengenai CRMC tersedia di: <https://zcralliance.org/crmc/>



Banjir di Kota Can Tho, Vietnam, September 2025. Foto: ISET-International



Mengintegrasikan CCA dan DRR ke dalam anggaran publik

Perubahan yang bertahan lama terjadi ketika prioritas ketangguhan masyarakat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan publik yang sudah ada. Pergeseran ini mengubah posisi ketangguhan dari sekadar kegiatan berbasis proyek menjadi tanggung jawab publik yang diakui. Hal ini telah menjadi ciri utama dari sebagian besar kerja Aliansi, termasuk bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menetapkan dan meningkatkan alokasi anggaran untuk DRR (Bangladesh, Yordania, Kenya, dan Nepal), serta mengintegrasikan biaya rutin untuk DRR ke dalam anggaran (Vietnam).

POIN UTAMA: Mengintegrasikan CCA dan DRR ke dalam anggaran daerah, dikombinasikan dengan proses partisipatif yang kuat, memperkuat kepemilikan masyarakat dan keberlanjutan intervensi ketangguhan.



Menunjukkan kelayakan untuk diperluas

Proyek uji coba yang menunjukkan manfaat nyata membantu membangun kepercayaan di kalangan otoritas publik untuk memperluas cakupan program dan memanfaatkan pendanaan publik jangka panjang bagi berbagai intervensi kunci. Melembagakan ketangguhan dalam anggaran daerah dapat mengubah proyek uji coba menjadi kebijakan. Di beberapa tempat, solusi adaptasi tertentu telah terbukti efektif dan diperluas oleh otoritas lokal, dengan biaya ditanggung oleh anggaran publik daerah (Indonesia dan Vietnam). Di tempat lain, tim bekerja sama erat dengan pemerintah daerah, melembagakan upaya tersebut agar dapat diterapkan dalam skala yang lebih luas ke pemerintah daerah lain (Yordania dan Filipina).

POIN UTAMA: Hasil yang terlihat mengubah persepsi tentang ketangguhan dari 'kegiatan proyek' menjadi 'investasi publik' yang dapat diterapkan dalam skala yang lebih luas.



Membangun pemahaman tentang proses penganggaran dan memperkuat kapasitas tata kelola daerah

Penyusunan anggaran dan proses penganggaran tidak selalu sederhana atau mudah untuk diikuti. Partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses keuangan memerlukan penguatan pemahaman mereka tentang cara kerja sistem tersebut, titik masuk yang penting, dan masukan yang sesuai. Demikian pula, karena keterbatasan kapasitas pemerintah, masih ada ruang untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah. Semua studi kasus ini telah melibatkan penguatan kapasitas dalam berbagai bentuk, termasuk pelatihan manajemen keuangan untuk mengelola dana secara transparan (Malawi), literasi keuangan (Indonesia), analisis anggaran dan pemantauan pengeluaran (Nigeria dan Nepal), serta penguatan komite ketangguhan (Bangladesh dan Filipina).

POIN UTAMA: Penguatan kapasitas bukanlah sekadar tambahan; hal ini merupakan landasan bagi masyarakat untuk memengaruhi keuangan publik.



Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal

Meningkatkan alokasi anggaran untuk CCA dan DRR hanyalah langkah awal. Hal ini harus dibarengi dengan penguatan tata kelola pengeluaran dan pelaporan keuangan yang transparan guna membangun kepercayaan, memungkinkan advokasi yang didasarkan pada informasi yang memadai, serta mempertahankan momentum untuk investasi lebih lanjut. Upaya ini mencakup peningkatan dokumentasi dan transparansi (Kenya) serta pemantauan anggaran (Bangladesh dan Nepal).

POIN UTAMA: Peningkatan alokasi anggaran sering kali memerlukan perbaikan paralel dalam hal akuntabilitas dan pemantauan pengeluaran.



Model kolaboratif dapat mendorong pembiayaan bersama

Ketika masyarakat, pemerintah daerah, dan program yang didanai melalui hibah berbagi tanggung jawab atas pelaksanaan intervensi, maka kolaborasi tersebut dapat membangun momentum, meningkatkan peluang keberlanjutan tindakan, dan menghasilkan tambahan investasi atau pendanaan. Langkah tersebut dapat diwujudkan melalui pembagian tanggung jawab pembiayaan dan pelaksanaan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan Aliansi (seperti di Filipina); atau melalui pengembangan skema pembiayaan yang menggabungkan kontribusi masyarakat, dana pendamping pemerintah daerah, anggaran wilayah masyarakat adat, serta pendanaan dari Aliansi (seperti di Bolivia).

POIN UTAMA: Ketika kolaborasi, rasa kepemilikan, dan tanggung jawab bersama terwujud, pendanaan pun dapat menyusul.



Seorang petani sedang bekerja di sawahnya di tengah panas ekstrem Madanpur, Nepal. Foto: Prosper Global

Rekomendasi kebijakan

Berdasarkan berbagai pembelajaran yang diperoleh dari studi kasus di berbagai negara oleh Aliansi, rekomendasi di bawah ini memaparkan langkah-langkah utama untuk mendukung adaptasi iklim yang dipimpin secara lokal:

Pemerintah daerah sebaiknya:

- ➔ **membentuk atau memperluas pos anggaran khusus untuk DRR** guna mendanai upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, bukan hanya tanggap darurat;
- ➔ **mengintegrasikan ketahanan iklim ke dalam rencana pembangunan daerah dan rencana investasi tahunan**, memastikan anggaran mencerminkan risiko dan prioritas yang diidentifikasi oleh masyarakat;
- ➔ **melembagakan partisipasi masyarakat yang bermakna** melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran formal dengan jaminan keterwakilan kelompok marginal, termasuk perempuan, anak-anak dan remaja, pengungsi, Masyarakat Adat, serta penyandang disabilitas;
- ➔ **meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal** dengan menerapkan sistem pelaporan keuangan dan pemantauan pengeluaran yang kuat untuk CCA dan DRR; dan
- ➔ **menggunakan bukti yang dihimpun oleh masyarakat, seperti penilaian risiko partisipatif, untuk memandu keputusan anggaran.**

Pemerintah pusat sebaiknya:

- ➔ **memberdayakan pemerintah daerah dengan kewenangan, dukungan teknis, dan pendanaan yang stabil dan dapat diandalkan (predictable)** yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam hal CCA dan DRR, terutama di wilayah berisiko tinggi atau yang kekurangan sumber daya;
- ➔ **mengintegrasikan adaptasi yang dipimpin secara lokal ke dalam sistem pemerintahan dengan menerbitkan pedoman nasional** untuk perencanaan dan penganggaran inklusif, termasuk standar partisipasi, data terpilah, aksesibilitas, keterlibatan anak dan remaja, serta akuntabilitas terhadap kelompok marginal;
- ➔ **menetapkan alokasi anggaran khusus di tingkat lokal dalam pos pendanaan DRR** untuk memastikan sumber daya menjangkau tingkat daerah;
- ➔ **mewajibkan rencana daerah untuk menunjukkan pengambilan keputusan yang didesentralisasikan, perencanaan program yang fleksibel, aliran anggaran yang jelas, dan akuntabilitas ke bawah** sejauh hal ini selaras dengan struktur tata kelola; dan
- ➔ **memperkuat hubungan antara pendanaan iklim nasional dan implementasi lokal** sehingga sumber daya dari dana iklim dan anggaran nasional dapat secara andal sampai ke lembaga-lembaga lokal dan prioritas masyarakat.

Lembaga perantara sebaiknya:

- ➔ **bekerja sama dengan dan memperkuat sistem tata kelola yang sudah ada** agar lembaga, proses, dan kapasitasnya tetap bertahan melampaui masa berlaku masing-masing proyek;
- ➔ **menyelaraskan bukti yang dihimpun masyarakat dengan siklus kebijakan dan anggaran lokal** guna memastikan bukti tersebut dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang nyata;
- ➔ **berinvestasi pada kapasitas dan organisasi lokal untuk memperkuat kepemimpinan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal secara bertahap.** Hal ini mencakup upaya mempertemukan masyarakat, pemangku kepentingan lokal, dan lembaga-lembaga, terutama untuk terlibat dalam proses kebijakan dan anggaran, sambil menerapkan pendekatan berbasis kepercayaan yang mengalihkan kekuasaan dan sumber daya kepada masyarakat;
- ➔ **memastikan keterlibatan yang bermakna dari kelompok marginal**, termasuk anak-anak, remaja, perempuan dan anak perempuan, penyandang disabilitas, Masyarakat Adat, serta penduduk yang terpaksa mengungsi;

- ➔ **mengolah bukti teknis menjadi pesan advokasi yang mudah dipahami dan usulan anggaran praktis** yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan dan negosiasi;
- ➔ **mendukung akuntabilitas yang dipimpin oleh masyarakat, dengan membantu masyarakat** memantau komitmen pendanaan, pengeluaran, serta apakah investasi tersebut memberikan manfaat bagi mereka yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Para donor dan penyandang dana internasional sebaiknya:

- ➔ **meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas pendanaan adaptasi** dengan bergerak cepat menuju komitmen untuk meningkatkan pendanaan adaptasi setidaknya tiga kali lipat;
- ➔ **berinvestasi pada program jangka panjang** yang memungkinkan pembangunan kepercayaan, penguatan kapasitas, perencanaan lokal, dan perubahan kelembagaan, alih-alih siklus proyek jangka pendek;
- ➔ **berinvestasi pada organisasi dan kapasitas lokal**, untuk memungkinkan pengelolaan keuangan dan perencanaan lokal, termasuk berinvestasi pada pengembangan dan struktur organisasi lokal, literasi anggaran, pengorganisasian masyarakat, penilaian risiko partisipatif, advokasi lokal, pelacakan keuangan publik, dan pemantauan yang dipimpin masyarakat;
- ➔ **menempatkan prinsip-prinsip adaptasi yang dipimpin secara lokal sebagai inti dari perancangan program**, termasuk fleksibilitas, sehingga tindakan dirancang dan dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat, berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat;
- ➔ **memprioritaskan mekanisme akses langsung** yang menyalurkan sumber daya ke pemerintah daerah dan organisasi lokal. Sederhanakan proses pengajuan, perluas kriteria kelayakan, restrukturisasi due diligence (uji tuntas), dan fokus pada komunikasi yang mudah diakses untuk memfasilitasi hal ini; dan
- ➔ **secara resmi mendukung dan menerapkan prinsip-prinsip adaptasi yang dipimpin secara lokal.**

Secara keseluruhan, wawasan dalam laporan ini menyoroti bagaimana adaptasi yang dipimpin secara lokal dapat diterapkan dalam praktik, serta bagaimana hal tersebut dapat diwujudkan di tengah keterbatasan sistem keuangan publik yang nyata. Bagian-bagian berikut mengolah pengalaman Aliansi menjadi panduan praktis untuk menyiasati siklus politik, tekanan anggaran, dan hambatan kelembagaan. Di dalamnya diuraikan berbagai peluang yang dapat tercapai ketika prioritas masyarakat, bukti, dan proses tata kelola saling selaras, sekaligus menawarkan pemahaman yang berlandaskan kenyataan tentang bagaimana kemajuan tetap dapat dicapai bahkan dalam konteks yang menantang. Pada akhirnya, laporan ini menunjukkan arah yang perlu ditempuh menuju investasi yang lebih strategis, kolaborasi yang lebih efektif, dan pergeseran yang lebih berkelanjutan menuju adaptasi yang dipimpin secara lokal.



Seorang warga di kawasan Santa Inés, Lima, Peru, ikut serta dalam proses Climate Resilience Measurement for Communities (CRM). Foto: Practical Action

Dari bukti hingga alokasi anggaran: Pembiayaan iklim pada tingkat daerah di Indonesia

INDONESIA



Prosper Global Indonesia



Risiko Iklim

Indonesia sedang menghadapi risiko iklim yang semakin meningkat, terutama banjir pesisir, kenaikan permukaan laut, dan panas ekstrem (World Bank, 2025). Banyak rumah tangga bergantung pada sektor perikanan dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam lainnya yang sensitif terhadap variabilitas iklim. Pada kawasan pesisir dataran rendah di pantai utara Jawa, seperti Pekalongan, genangan pesisir permanen telah memaksa masyarakat untuk berpindah tempat tinggal, sementara praktik tata guna lahan di wilayah hulu terus memperparah risiko banjir di wilayah hilir.

Konteks kebijakan

Indonesia memiliki kerangka nasional dan daerah untuk perencanaan iklim dan pembangunan. Namun, memastikan agar risiko lokal dan prioritas masyarakat tercermin dalam sistem tersebut masih menjadi tantangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menentukan prioritas sektoral, sementara pemerintah desa memegang peranan penting dalam mengalokasikan dana publik melalui proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

"Masyarakat Jeruksari telah terbantu melalui pendampingan pengetahuan dan peningkatan literasi, sehingga mereka tidak lagi panik ketika berhadapan dengan fenomena perubahan iklim, seperti banjir rob. Kini, Jeruksari dipenuhi oleh warga yang sibuk bekerja dan memiliki mata pencaharian yang didukung oleh ZCRA. Menurut saya, masyarakat kini mampu beradaptasi. Demi masa depan yang lebih baik, Desa Jeruksari juga sudah bersedia mereplikasi inisiatif ini melalui Dana Desa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka yang lebih panjang."

Bapak Budi, Kepala Desa Jeruksari



Keramba jaring apung telah dipasang di Desa Jeruksari sebagai replikasi dari proyek serupa yang telah berhasil. Foto: Prosper Global



Jalur 2: Memastikan kebijakan, perencanaan, dan regulasi berlandaskan bukti dan prioritas masyarakat

Prosper Global Indonesia memperkuat pemanfaatan bukti terkait adaptasi perubahan iklim (*climate change adaptation* atau CCA) dan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction atau DRR) dalam sistem perencanaan tingkat desa dan memandu pengalokasian sumber daya. Penilaian CRMC (*Climate Resilience Measurement for Communities* atau Pengukuran Ketahanan Iklim untuk Masyarakat) digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan ketahanan di tingkat lokal dan tindakan prioritas di tingkat masyarakat, yang kemudian dihipunkan ke dalam rencana aksi masyarakat. Rencana tersebut disusun melalui proses partisipatif yang melibatkan warga dan perwakilan pemerintah setempat untuk bersama-sama memprioritaskan tindakan yang relevan serta pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaannya. Rencana ini disampaikan dalam Musrenbang, sehingga bukti yang dihipunkan oleh masyarakat dapat menjadi masukan langsung bagi penentuan prioritas pembangunan.

Prosper Global Indonesia mengembangkan dan mengujicobakan model mata pencaharian yang berketahanan iklim di kawasan pesisir bagian hilir, seperti keramba jaring apung, pembenihan dengan sistem bioflok, dan pengolahan ikan bandeng. Uji coba tersebut dilaksanakan oleh kelompok pembudidaya ikan di desa-desa sasaran dengan dukungan dari dinas perikanan, kesehatan, dan perdagangan. Uji coba tersebut menunjukkan kelayakan teknis sekaligus manfaat nyata bagi mata pencaharian masyarakat. Keterlibatan berkelanjutan dengan pemerintah desa serta instansi terkait membantu menghubungkan temuan CRMC dengan model-model praktis tersebut, sekaligus membangun keyakinan bahwa intervensi yang diusulkan layak diterapkan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Hasil

Pendekatan gabungan ini berkontribusi pada perubahan signifikan dalam perencanaan dan penganggaran desa. Di Desa Jeruksari, intervensi mata pencaharian yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim secara resmi diintegrasikan ke dalam kebijakan desa dan perencanaan anggaran tahunan. Sebagian anggaran desa (APB Desa) dialokasikan untuk keramba jaring apung, pelatihan pengolahan ikan bandeng bagi kelompok perempuan, serta pemeliharaan sistem informasi iklim berbasis masyarakat. Kemajuan serupa terjadi di Desa Simego, di mana kegiatan adaptasi iklim dan konservasi dimasukkan secara langsung ke dalam anggaran desa, sehingga dapat dibiayai secara mandiri oleh pemerintah desa.

Perubahan ini menandai peralihan dari proyek uji coba yang didukung pihak eksternal menjadi prioritas desa yang dibiayai oleh anggaran pemerintah. Mata pencaharian yang tahan terhadap dampak perubahan iklim dan langkah-langkah adaptasi kini diakui sebagai bagian dari agenda pembangunan desa dan didanai secara mandiri melalui sumber pendanaan publik yang stabil dan dapat diandalkan (*predictable*). Dengan memadukan bukti yang dihasilkan di tingkat lokal dengan solusi praktis yang nyata, Prosper Global Indonesia membantu pemerintah daerah menerjemahkan informasi risiko iklim menjadi keputusan kebijakan dan penganggaran yang konkret.



Ringkasan pembelajaran

- ➔ **Bukti dapat memberikan pengaruh paling besar ketika dipadukan dengan solusi yang dapat diterapkan:** Data CRMC mendapatkan perhatian luas karena dilengkapi dengan model mata pencaharian praktis, seperti keramba jaring apung yang dapat dilihat, diuji, dan dipercaya oleh pemerintah setempat.
- ➔ **Sistem perencanaan desa merupakan pintu masuk yang strategis bagi pembiayaan CCA dan DRR:** Proses pembahasan dalam Musrenbang menyediakan mekanisme resmi agar bukti dari masyarakat dapat menentukan prioritas pembangunan dan keputusan anggaran.
- ➔ **Pelembagaan ketahanan dalam anggaran desa dapat mengubah proyek uji coba menjadi kebijakan:** Setelah mata pencaharian yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim dan langkah konservasi dimasukkan ke dalam anggaran desa, keduanya diakui sebagai prioritas desa, bukan lagi sekadar kegiatan yang didorong pihak eksternal.
- ➔ **Kolaborasi lintas sektor memperkuat kredibilitas dan penerapan:** Kerja sama dengan dinas perikanan, kesehatan, dan perdagangan membantu menunjukkan bahwa langkah-langkah adaptasi selaras dengan tujuan pembangunan yang lebih luas, dan bukan semata-mata selaras dengan sasaran terkait iklim.
- ➔ **Rasa memiliki di tingkat lokal mendorong keberlanjutan dan replikasi:** Ketika desa membiayai sendiri langkah-langkah adaptasi, maka langkah-langkah adaptasi tersebut memperoleh kemandirian dan dapat diadopsi oleh desa-desa tetangga dan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan yang lebih luas. Hal ini tercermin dalam model akuakultur program ini, yang mendorong praktik berkelanjutan melalui pengurangan penggunaan bahan kimia, serta menumbuhkan komitmen kolektif di antara pembudidaya ikan di seluruh Pekalongan Raya untuk menghentikan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam akuakultur.



Climate
Resilience
Alliance

Tetap terhubung...

Kirim email ke info@ZCRAlliance.org,
kunjungi ZCRAlliance.org atau ikuti
kami di [LinkedIn](#).

Penafian:

Laporan ini diterbitkan oleh Zurich Climate Resilience Alliance, tetapi isi laporan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penulis dan organisasi yang disebutkan. Para anggota Zurich Climate Resilience Alliance menerima pembiayaan dari Z Zurich Foundation, kecuali Zurich Insurance Group. Namun, pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini tidak selalu mencerminkan posisi resmi Z Zurich Foundation maupun Zurich Insurance Group.

Terima kasih juga kepada Clare Convey, Andrew Duthie, Patrick Morrison, dan Lucile Robinson atas kontribusi mereka dalam proses penyuntingan, desain, dan penerbitan.

Gambar sampul depan: Fatuma berdiri di samping jembatan baru di dekat desanya, yang dibangun oleh pemerintah daerah setelah anggota masyarakatnya mengadvokasi perubahan. Foto: Concern Worldwide

Bermitra dengan:



Didukung oleh:  **ZURICH** Foundation

© 2026 Zurich Climate Resilience Alliance